

## **FLYPAPER EFFECT DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN/ KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016-2018**

**Arbi Tama Nugraha**  
**Rudy Badrudin**

*E-mail:* [rudybadrudin.stieykpn@gmail.com](mailto:rudybadrudin.stieykpn@gmail.com)

### **ABSTRACT**

The selected regional autonomy becomes a system of relations between the central and regional governments. Regional autonomy is carried out to achieve the goals of community welfare at various levels. local governments prepare regional revenue and expenditure budgets (APBD) to increase economic growth that supports community welfare. The purpose of this study is to find out and analyze the phenomenon of the flypaper effect through the influence of local revenue (PAD) and general allocation funds (DAU) on capital expenditures (BM) and their effect on economic growth and unemployment (TPT). The selected areas cover all regencies and cities in Central Java Province. This study takes data on the realization of the regional income and expenditure budget (APBD) at the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance during the 2016-2018 period. The population in this study were all districts and cities in the province of Central Java. The sampling technique used purposive sampling which resulted in 105 data from 29 regencies and 6 cities in Central Java Province. The test results in this study indicate that PAD has a negative and insignificant effect on capital expenditure, DAU has a positive and significant effect on capital expenditure and shows that there is no flypaper effect. The test results also show that capital expenditure has a negative and insignificant effect on economic growth, economic

growth is not able to affect the unemployment rate

**Keywords:** regional original income, general allocation fund, capital expenditure, economic growth, unemployment rate, flypaper effect

**JEL classification:** H72, I32, R11

### **PENDAHULUAN**

Permasalahan dalam pembangunan salah satunya kemiskinan. Kemiskinan disebabkan oleh pengangguran dan keterlatarbelakangan, yang mengakibatkan kesenjangan. Tuntutan pemerintah daerah terhadap keinginan untuk wewenang mengatur daerahnya masing-masing. Otonomi daerah di Indonesia didukung oleh paket undang-undang otonomi daerah UU No 33 tahun 2004 dan UU No 32 tahun 2004. Penerbitan UU No 17 tahun 2003 menimbulkan adanya kewajiban pemerintah dalam menyusun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) guna meningkatkan kontribusi masyarakat melalui transparansi keuangan. Pada pos pendapatan APBD terdapat pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan hasil kemampuan asli daerah dimana PAD hanya mampu memberikan persentase alokasi rendah dibanding dana perimbangan

gan. PAD hanya mampu memenuhi 20% dari total pendapatan daerah (Iskandar, 2012) dan menjadi sumber alokasi belanja daerah, tapi besaran PAD di bawah dana perimbangan (Subadriyah & Solikul, 2018). PAD rendah mengakibatkan turun tangan pemerintah pusat untuk membantu keuangan daerah melalui dana perimbangan guna mengatasi kesenjangan fiskal terjadi.

Dana perimbangan salah satunya dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan belanja daerah dengan tuntutan laporan pertanggungjawaban APBD. DAU memiliki nominal lebih besar dari dana perimbangan lain karena fungsinya mengatasi kesenjangan fiskal. Wewenang penggunaan seluasnya dari pemerintah daerah dan menuntut laporan pertanggungjawaban (Kusumadewi & Rahman, 2007) itulah DAU. Karena penggunaan belanja daerah semakin besar, maka alokasi DAU akan semakin besar setiap tahunnya (Mulya & Bustamam, 2016) yang menimbulkan masalah baru di pemerintah daerah.

Pengeluaran dalam belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk pembangunan daerah. Tersedianya saran dan prasarana publik mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari realisasi belanja modal. Pengelolaan aset dan pengadaan aset tetap pemerintah berguna sebagai pendukung kegiatan pemerintah pusat dan daerah (Mirza, 2012).

PAD menjadi cermin kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya melalui belanja daerah, tapi ketidakmampuan pemerintah daerah dalam pemenuhan pendapatan daerah menimbulkan dana perimbangan. Hal ini menyebabkan timbul salah arti pada respon daerah terhadap dana perimbangan khususnya DAU. Jika ini terjadi fenomena *flypaper effect* terbukti dari dampak DAU pada belanja daerah lebih besar dari dampak PAD di belanja daerah. Jadi, sikap pemerintah sudah menyimpang dalam alokasi belanja daerahnya tanpa imbal balik pada PAD.

Perolehan aset tetap terwujud melalui realisasi alokasi belanja modal yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan jadi jembatan bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dari perhitungan produk domestik bruto dan terjadi karena adanya peningkatan pendapatan daerah dari tahun ke tahun dengan angka tahun dasar sebagai acuan. Pertumbuhan ekonomi ialah hasil dari kegiatan ekonomi sektor produksi barang dan jasa.

Dasar pemilihan lokasi penelitian yang dilaku-

kan dalam penelitian dilihat melalui banyaknya jumlah penduduk yang ada dalam provinsi Jawa Tengah dari tahun 2016-2018. Dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki DAU yang lebih tinggi dari pada PAD. Hal ini diindikasikan adanya *flypaper effect* di provinsi Jawa Tengah

## MATERI DAN METODE PENELITIAN

### Teori Keagenan

Teori ini membahas mengenai hubungan wewenang menurun dari atas ke bawah yang diberikan *prinsipal* kepada *agent* secara tersirat ataupun tersurat dalam kontrak. Tujuan agar *agent* dapat menjalankan tugas sesuai keinginan *principal*. Hubungan ini menemukan masalah karena perbedaan tujuan *agent* dengan *principal* dan *principal* tidak mampu melihat perilaku *agent* dengan benar (Jensen & Meckling, 1976). Oleh sebab itu menimbulkan informasi asimetris yang membawa hubungan wewenang ini terjadi *moral hazard* dan *advers selection* (Eisenhardt, 2018). Teori ini digunakan dalam penerapan kebijakan publik melalui pemerintah pusat sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent* (Bergman & Lane, 1990). Masalah teori ini terwujud melalui adanya fenomena *flypaper effect*

### Teori Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Adam Smith (1776) melihat proses pertumbuhan ekonomi melalui pertumbuhan *output* total dan pertumbuhan penduduk (Arsyad, 2010:74). Pertumbuhan *output* total terlihat dalam SDA yang merupakan tahap awal produksi masyarakat. SDA digunakan seluruhnya optimal dapat menghentikan pertumbuhan *output*, jika tidak maka penduduk dan stok modal masih berpengaruh pada pertumbuhan *output*. SDM memiliki pengaruh statis terhadap pertumbuhan *output* sesuai penawaran dan permintaan tenaga kerja. Spesialisasi dan kelompok kerja dilakukan berdasarkan pengaruh stok modal aktif yang berakibat pada peningkatan keterampilan dan optimalisasi waktu pekerja (Badrudin, 2017:126-127).

Nicholas Kaldor dalam teorinya membagi kelas masyarakat menjadi kapitalis dan buruh (Djojohadikusumo, 1994) dengan empat bagian masyarakat sosio-ekonomis yaitu perkotaan/ pedesaan dan industri/ jasa. Teori ini memiliki pendekatan *stylized facts* dalam pengujian empiris-kuantitatif untuk melawan teori Neo-Keynes dan Neo-Klasik dan menganggap

pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbeda karena arti dan dampak yang berbeda.

Oleh karena itu Ilmu yang berhubungan dengan peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional diikuti oleh peningkatan hasil produksi nasional yaitu pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan ilmu yang menggali pembahasan pergantian tatanan struktur ekonomi menyeluruh dengan berjalannya waktu diikuti dengan landasan kegiatan ekonomi atau dengan struktur ekonomi rakyat negara tersebut yaitu pembangunan ekonomi nasional (Djojohadikusumo, 1994).

### Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) ialah hasil tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sesuai periode ditetapkan dan sebagai alat kendali terhadap transparansi penggunaan anggaran dan koreksi pelayanan publik oleh masyarakat. Pendapatan daerah diperoleh melalui pengorbanan yang dilakukan atas pemberdayaan sumber daya daerah. Pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya khas daerah hal ini juga yang menjadi cermin keberhasilan realisasi kebijakan publik yaitu PAD. PAD ini akan terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat untuk membantu keberlangsungan kegiatan pemerintahan daerah. *Unconditional grant* yang merupakan dana perimbangan dengan wewenang penggunaan bebas terdiri dari DAU dan DBH. DAU akan diberikan pada pemerintah daerah paling kecil 26% dari pendapatan dalam negeri neto (Aminus, 2018). Pemberian tergantung pada kesenjangan fiskal dan alokasi dasar serta 10% akan diberikan kepada provinsi dan sisanya kepada kabupaten/ kota.

Belanja daerah merupakan kewajiban hasil dari seluruh pengeluaran anggaran pada tahun yang bersangkutan. Belanja daerah akan digunakan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menjembatani permintaan masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana di luar milik swasta. belanja daerah akan memiliki pengaruh yang langsung terhadap kegiatan pemerintah daerah melalui belanja langsung. Belanja modal yang mana merupakan belanja langsung alokasinya dalam APBD digunakan dalam realisasi penyediaan sarana dan prasarana publik. Belanja modal akan terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan

dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Yuwono et al., 2008)

### Tingkat Pengangguran

Pengangguran sebagai *problem* untuk perekonomian karena tingkat daya produksi dan perolehan masyarakat akan mengalami pengurangan maka memicu timbul kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Pengangguran bisa terjadi dari beberapa faktor yang paling utama adalah kurangnya pengeluaran dari barang dan jasa di faktor perekonomian.

### Flypaper Effect

Besaran dana perimbangan sering kali menimbulkan pengeluaran meningkat setiap tahunnya karena tuntutan penggunaannya. Hal ini menimbulkan fenomena baru dari alokasi tanpa syarat dana perimbangan dirispon asimetris dalam belanja daerah yaitu fenomena *flypaper effect*. Fenomena ini terjadi ketika penerimaan dana alokasi direalisasikan dalam belanja daerah tanpa berdampak pada peningkatan pendapatan daerah (Ishak et al., 2019). Akibat dari fenomena ini terjadi elastisitas pengeluaran atas alokasi transfer lebih besar dari elastisitas pengeluaran atas alokasi penerimaan paja daerah (Kuncoro, 2007). Hasil dari keberadaan fenomena ini yaitu, kesenjangan fiskal masih ada, pemanfaatan sumber PAD yang kurang maksimal, ketergantungan dana perimbangan, dan adanya respon berlebihan dana transfer sehingga kemandirian daerah rendah (Mulya & Bustamam, 2016).

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Beberapa penelitian sebelumnya melihat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal sejalan dengan penelitian dilakukan oleh (Arwati & Hadiati, 2013), (Mawarni et al., 2013), dan (Sumarmi, 2010) membuktikan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah mampu memengaruhi secara signifikan pada belanja daerah (Afriawati, 2011). Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu asal dari penerimaan terbesar yang mendukung keberlangsungan kegiatan daerah atas belanja daerah. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

**H<sub>1</sub>:** Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/ Kota di

Provinsi Jawa Tengah 2016-2018

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal sejalan dengan penelitian dilakukan oleh Penelitian (Darmayasa, 2013), (Sari, 2018) dan (Karwur *et al.*, 2018). Penelitian itu melihat akibat dari pemberian wewenang seluas-luasnya pada pemerintah daerah terhadap DAU. Penelitian (Solikin, 2016) melihat bahwa penggunaan DAU saat ini merubah formulasi seharusnya fungsi DAU. Hal ini akibat dari pergeseran tujuan pemerintah terhadap pemberian DAU akan kesenjangan fiskal daerah. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Dana alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap belanja modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi sejalan dengan penelitian dilakukan oleh penelitian (Wahyudin & Yuliadi, 2013), (Arini S & Kusuma, 2019), dan (Arini S, 2016). Penelitian diatas menunjukkan pengaruh yang positif signifikan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu disebabkan karena keberadaan sarana dan prasarana publik dari belanja modal menghasilkan peningkatan pendapatan yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Beberapa penelitian sebelumnya dilakukan guna melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran sejalan dengan penelitian dilakukan oleh penelitian penelitian (Harfina, 2009), (Franita, 2016), dan (Khan I, 2013) Penelitian diatas mendukung bahwa pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi tingkat pengangguran secara negatif dan signifikan. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang baik

sebagai cermin kesejahteraan masyarakat. Berdasar uraian tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Pertumbuhan ekonomi (PE) berpengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran (TPT) di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018

Dalam penelitian ini menggunakan unit analisis setingkat pemerintah daerah kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis penelitian kuantitatif meliputi seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018 sekaligus menjadi populasi dengan sampel diambil dengan teknik *purposive sampling* dengan tujuan tertentu dalam memilih sampel tanpa mengacaknya. Berupa data yang digunakan secara keseluruhan berjumlah 105 data (29 kabupaten dan 6 Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2018).

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang mana diperoleh dengan cara tidak turun langsung ke lapangan (Sugiyono, 2008) laporan realisasi APBD pada bagian PAD, DAU, dan BM serta data PE dan TPT. Sumber data laporan realisasi APBD bagian PAD, DAU, BM diperoleh dari situs resmi direktorat jendral perimbangan keuangan (DJPK). Data PE dan TPT diambil pada situs resmi badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan didukung oleh sumber pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, undang-undang, *website*, dan *e-book* yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Analisis Deskriptif**

Menunjukkan hasil analisis deskriptif secara statistik dilihat dari PAD minimum dimiliki Kabupaten Blora pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 171.278,00 dan jumlah PAD maksimum dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 1.491.646,00 serta rata-rata PAD dengan jumlah Rp. 329.120,68 dan standar deviasi dengan jumlah Rp. 149.875,43. Oleh karena itu hasil pada PAD terlihat memiliki tingkat PAD rendah.

DAU minimum dimiliki Kota Magelang pada tahun 2018 dengan jumlah Rp. 400.041.244,00 dan jumlah DAU maksimum dimiliki oleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2017 dengan jumlah Rp. 1.398.539.653,00, serta memiliki rata-rata DAU den-

Tabel 1  
Analisis Deskriptif

Variabel	N	Maksimum	Minimum	Rata – Rata	Standar Deviasi
PAD	105	1.491.646,00	171.278,00	329.120,68	149.875,43
DAU	105	1.398.539.653,00	400.041.244,00	968.102.156,30	249.004.859,2
BM	105	843.986,00	102.671,00	373.081,21	140.840,65
PE	105	23,54	2,54	5,56	1,90
TPT	105	9,52	1,50	4,66	1,70

gan jumlah Rp. 968.102.156,30 dan standar deviasi dengan jumlah Rp. 249.004.859,2. Oleh karena itu hasil pada DAU terlihat memiliki tingkat BM rendah. BM minimum dimiliki Kota Semarang pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 102.671,00 dan jumlah BM maksimum dimiliki oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2016 dengan jumlah Rp. 843.986,00, serta memiliki rata-rata BM dengan jumlah Rp. 373.081,21 dan standar deviasi dengan jumlah Rp. 140.840,65. Oleh karena itu hasil pada BM terlihat memiliki tingkat PE rendah.

PE minimum dimiliki Kabupaten Kudus pada tahun 2016 dengan persentase 2,54 dan jumlah PE maksimum dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2016 dengan persentase 23,54, serta memiliki rata-rata PE dengan persentase 5,56 dan standar deviasi dengan persentase 1,90. Oleh karena itu hasil pada PE angka yang relatif setara antar daerah.

**Analisis induktif**  
**Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)**

Tabel 2  
*R-Square*

	<i>R-Square</i>	Keterangan
Belanja Modal	0,201	PAD dan DAU mampu mempengaruhi dan menjelaskan BM sebesar 20,1% lalu sisanya sebesar 79,9% dijelaskan oleh variabel lain
Pertumbuhan Ekonomi	0,000	BM tidak mampu mempengaruhi dan menjelaskan PE karena hanya sebesar 0,00% karena 100% lainnya dijelaskan oleh variabel lain
Tingkat Pengangguran	0,002	PE mampu mempengaruhi dan menjelaskan TPT sebesar 0,2% lalu 99,8% lainnya dijelaskan oleh variabel lain

**Tabel 3**  
**Koefisien Jalur**

Hipotesis	Sampel Asli	Rata – Rata Sampel	Standar Deviasi	T Statistik	P Value	Prediksi	Temuan	Keputusan
PAD → BM	-0,117	-0,118	0,168	1,057	0,291	+	-	Ditolak
DAU → BM	0,491	0,460	0,104	4,713	0,00	+	+	Diterima
BM → PE	-0,013	-0,046	0,097	0,131	0,895	+	-	Ditolak
PE → TPT	0,042	0,048	0,059	0,718	0,473	-	-	Ditolak

Keterangan: \* =  $T\text{ Statistic} > 1,96$  dan  $P\text{ Value} < 0,05$

\*\* =  $T\text{ Statistic} < 1,96$  dan  $P\text{ Value} > 0,05$

Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t\text{ statistic}$  1,057 lebih kecil  $t$  tabel 1,96 dan  $p\text{ value}$  0,291 lebih besar dari 0,05 kemudian nilai sampel asli sebesar -0,177. Oleh karena itu berarti PAD berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap BM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t\text{ statistic}$  4,713 lebih besar dari  $t$  tabel 1,96 dan  $p\text{ value}$  0,000 lebih kecil dari 0,05 kemudian nilai sampel asli sebesar 0,491. Oleh karena itu berarti DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t\text{ statistic}$  0,331 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,96 dan  $p\text{ value}$  0,895 lebih besar dari 0,05 kemudian nilai sampel asli sebesar -0,013. Oleh karena itu berarti BM berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap PE. Hasil pengujian menunjukkan bahwa  $t\text{ statistic}$  0,718 lebih kecil dari  $t$  tabel 1,96 dan  $p\text{ value}$  0,473 lebih besar dari 0,05 kemudian nilai sampel asli sebesar 0,042. Oleh karena itu berarti PE berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap TPT. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai koefisien PAD yaitu -0,177 terhadap BM dengan pengaruh tidak signifikan yaitu  $t\text{ statistic}$  1,057 dan  $p\text{ value}$  0,291 lebih kecil dibandingkan nilai koefisien DAU yaitu 0,491 dengan pengaruh signifikan yaitu  $t\text{ statistic}$  4,713 dan  $p\text{ value}$  0,000

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Berdasar hasil uji analisis yang dilakukan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan ditolaknya hipotesis

1 (H1) yang memperlihatkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap BM Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2018. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai  $p\text{ value}$   $0,291 < 0,05$  dan nilai  $t\text{-statistic}$   $1,057 > 1,96$ . Oleh sebab itu, pendapatan asli daerah belum menyuguhkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal yang akan dicapai.

Pengaruh tidak signifikan dan negatif ini merupakan belum maksimalnya bentuk dari usaha pemerintah dalam peningkatan kemandirian daerah melalui pengelolaan sumber daya asli milik daerah. Alokasi belanja modal yang diperoleh atas PAD akan belum digunakan seoptimal mungkin sehingga belum mampu memuaskan pemerintah daerah dalam hal timbal balik yang baik berupa meningkatnya PAD. Tidak adanya imbal balik yang berakibat pada PAD ini akan memberikan pandangan pemerintah pusat terhadap belum adanya kemandirian daerah. Oleh karena itu pemerintah pusat mampu menilai bahwa pemerintah daerah belum dapat menjalankan tujuan mereka sekaligus belum mampu mencapai tujuan otonomi daerah dan desentralisasi yang merupakan tuntutan daerah atas keleluasaan wewenang.

Hasil uji pada penelitian ini tidak mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Arwati & Hadiati, 2013), (Mawarni *et al.*, 2013), dan (Sumarmi, 2015). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap belanja modal.

### **Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal**

Berdasar hasil uji analisis yang dilangsungkan, temuan pada penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 2 (H2) yang memperlihatkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap BM Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2018. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai  $p\ value\ 0,000 < 0,05$  dan nilai  $t\text{-statistic}\ 4,731 > 1,96$ . Oleh sebab itu, meningkatnya dana alokasi umum akan memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan belanja modal.

Hasil yang penelitian ini temukan adanya pengaruh signifikan dan positif diakibatkan karena sifat DAU yang termasuk dalam *unconditional grant*. Hal ini berarti bahwa DAU ini diberikan pemerintah pusat dengan wewenang penggunaan seluas-luasnya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Peningkatan yang terjadi pada belanja modal searah dengan peningkatan DAU itu sendiri. DAU diberikan kepada pemerintah daerah menurut kepentingan dan kebutuhan daerah itu sendiri. DAU ini berfungsi sebagai penghilang celah fiskal yang terjadi antardaerah maupun dengan antarpemerintah (pusat-daerah). pada tahun 2016 – 2018 menjadikan DAU menjadi sumber penerimaan daerah dengan nominal terbesar dalam APBD. Hal itu disebabkan karena DAU pemerataan fiskal setiap daerah.

Hasil uji pada penelitian ini mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Darmayasa, 2013), (Sari, 2018), dan (Karwur *et al.*, 2018). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

### **Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasar hasil uji analisis yang dilangsungkan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 3 (H3) yang memperlihatkan bahwa BM berpengaruh negatif terhadap PE Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2018. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai  $p\ value\ 0,895 < 0,05$  dan nilai  $t\text{-statistic}\ 0,131 > 1,96$ . Oleh sebab itu, belanja modal belum memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai.

Belanja modal ialah belanja langsung yang masuk dalam pos pada APBD yang berguna untuk

berjalannya dari program – program atau kegiatan yang di lakukan oleh pemda yang secara langsung terlibat. Alokasi belanja modal digunakan sebagaimana fungsinya untuk pengadaan, pembelian, pembangunan, dan pelelangan untuk aset tetap. Dalam penelitian ini belanja modal belum mampu mendukung pertumbuhan ekonomi menuju kearah positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah mengharapkan peningkatan sarana dan prasarana publik mampu menunjang kelancaran kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat yang lancar ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kekuatan kegiatan yang dilakukan rumah tangga dan perusahaan. Oleh karena itu diharapkan mampu meningkatkan hasil produksi masyarakat.

Hasil uji pada penelitian ini tidak mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Wahyudin & Yuliadi, 2013), (Arini S & Kusuma, 2019), dan (Arini S, 2016). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa BM berpengaruh berpengaruh signifikan dan positif terhadap PE.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran**

Berdasar hasil uji analisis yang dilangsungkan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan diterimanya hipotesis 4 (H4) yang memperlihatkan bahwa PE berpengaruh negatif terhadap TPT Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian dengan nilai  $p\ value\ 0,473 < 0,05$  dan nilai  $t\text{-statistic}\ 0,718 > 1,96$ . Oleh sebab itu, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan memberi dampak yang tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran

Tingkat pengangguran dapat diketahui dari tinggi rendahnya lapangan pekerjaan. Hal itu sejalan dengan apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka lapangan pekerjaan akan meningkat hal itu juga berlaku sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi menurun maka lapangan kerja juga menurun. Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi mampu mendukung tingkat pengangguran menuju kearah negatif terhadap tingkat pengangguran. Pemerintah daerah mengharapkan peningkatan lapangan kerja mampu menunjang pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji pada penelitian ini tidak mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Harfina, 2009), (Franita, 2016), dan (Khan I, 2013). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil

bahwa PE berpengaruh signifikan dan negatif terhadap TPT

### **Analisis *Flypaper Effect***

Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini ingin menunjukkan keberadaan *flypaper effect*. Syarat terjadinya fenomena *flypaper effect* dengan mengetahui nilai koefisien dalam pengaruh DAU pada BM lebih besar daripada nilai koefisien pengaruh PAD pada BM dan keduanya yang sama-sama berpengaruh signifikan maka terjadi *flypaper effect* serta syarat jika PAD pada belanja modal tidak signifikan, maka tidak terjadi fenomena *flypaper effect*. Oleh karena itu syarat terjadinya *flypaper effect* melihat besaran nilai koefisien DAU pada BM lebih besar dari nilai koefisien PAD pada BM dengan syarat pada variabel PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap BM. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat *flypaper effect* di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hasil uji menunjukkan bahwa PAD memiliki *t statistic* 1,057 dengan *p value* 0,291 serta nilai koefisien 0,177 lebih kecil dari DAU memiliki *t statistic* 4,713 dengan *p value* 0,000 serta nilai koefisien 0,491. Hal itu menunjukkan nilai dampak (koefisien) PAD yang lebih kecil dari dampak (koefisien) DAU terhadap BM, namun pengaruh PAD tidak signifikan berbeda halnya dengan DAU yang berpengaruh signifikan.

Hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah belum mampu membiaya belanja modal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah belum mampu menyediakan sarana dan prasarana publik dengan PAD. pengelolaan sumber daya asli daerah yang baik mampu menjadikan cerminan kemandirian daerah dan tercapainya tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Hal ini dapat diketahui dengan pengoptimalan kewajiban daerah sehingga mampu memberikan hak kepada daerah dengan baik. Hasil uji pada penelitian ini mendukung hasil dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu penelitian (Iskandar, 2012), (Al Khoiri, 2015), dan (Darmayasa, 2013). Pada penelitian terdahulu itu menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat *flypaper effect* pada BM.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

PAD berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap

BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap BM di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. BM berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi atau disebut PE di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. PE berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran atau disebut TPT di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak terdapat *flypaper effect* karena dampak (koefisien) PAD yang lebih kecil dari dampak (koefisien) DAU terhadap BM, namun pengaruh PAD tidak signifikan berbeda halnya dengan DAU yang berpengaruh signifikan di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2018. Hasil dari pengujian ini memperlihatkan bahwasanya kemandirian daerah yang diwakilkan oleh PAD belum mampu membiayai BM untuk penyediaan sarana dan prasarana publik.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas menggunakan 3 tahun yaitu tahun 2016-2018. Karena tidak semua Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah memperbarui data setiap tahunnya di *web* masing-masing, sehingga peneliti kesulitan untuk memperoleh data Penelitian ini terbatas menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Padahal masih banyak variabel yang memengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah.

### **Saran**

Pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan realisasi belanja modal agar dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat pengangguran. Dengan tidak adanya *flypaper effect* ini seharusnya pemerintah lebih mampu menunjukkan kemandirian daerahnya yang berasal dari menurunnya tingkat pengangguran. Maka dari itu pemerintah daerah harusnya mampu memiliki rencana strategis agar dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi lingkungan produktif masyarakat sehingga dapat menambah lapangan kerja, pendidikan, dan standar hidup layak bagi masyarakat daerah tersebut.

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbanyak penambahan periode agar dapat mengikuti perubahan tiap periodenya sehingga dapat menggambarkan perkembangan apa yang sebenarnya

terjadi di Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Selain itu, penambahan indikator lain melalui penambahan indikator penanaman modal asing maupun domestik. Karena peningkatan pembangunan daerah mampu menarik investor swasta untuk berinvestasi di Jawa Tengah. Investor diharapkan mampu menyediakan lowongan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan hasil produksi. Hasil produksi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afrizawati. 2011. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah Kabupaten/ Kota di Sumatera. *Kajian Ekonomi*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.1057/9780230226203.1901>.
- Al Khoiri, R. H. 2015. *Flypaper Effect* Dan Belanja Daerah Di Propinsi Jawa Barat. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 211–230. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2306>.
- Algifari. 2016. *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis* (Edisi 3). UPP STIM YKPN.
- Aminus, R. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah ogan ilir. *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, 9(1), 47–56. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>.
- Amril, Erfit, & Safri, M. 2015. *Flypaper Effect* pada Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(3), 135–146. <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/JES/article/view/2270>.
- Ansori, W., & Muthmainah. 2019. Fenomena *Flypaper Effect* atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 151–163. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.389>.
- Arini S, P. R. 2016. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. 2(2), 180–198.
- Arini S, P. R., & Kusuma, M. W. 2019. Pengaruh Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Investasi Swasta Di Indonesia Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 5(1), 28. <https://doi.org/10.26486/jramb.v5i1.611>.
- Armawaddin, M. 2018. *Flypaper Effect Using SEM and PLS Models*. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 192–201. <https://doi.org/10.17977/um002v10i22018p192>.
- Armawaddin, M., Rumbia, W. A., & Afiat, M. N. 2017. *Flypaper Effect Analysis of District and City Locally Spending in Sulawesi*. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 18(1), 77–91. <https://media.neliti.com/media/publications/238203-analisis-flypaper-effect-belanja-daerah-01496859.pdf>.
- Arsyad, L. 2010. *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta.
- Arwati, D., & Hadiati, N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013*, 3(1), 498–507.
- Badrudin, R. 2012. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Repository STIE YKPN*, 1–32.
- Badrudin, R. 2017. *Ekonomika Otonomi Daerah* (Kedua). UPP STIM YKPN.
- Bappeda. 2016. *PAD dan Peningkatan Infrastruktur di Jawa Barat*. Bappeda Jabar. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2016/05/28/pad-dan-peningkatan-infrastruktur-di-jawa-barat/>
- Bergman, M., & Lane, J. E. 1990. *Public Policy in a Principal-Agent Framework*. *Journal of Theoretical Politics*, 2(3), 339–352. <https://doi.org/10.1177/0951692890002003005>.

- Darmayasa, I. N. 2013. *Flypaper Effect* DAU dan PAD Terhadap Belanja Modal Serta Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita, dan IPM. *Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali*, 139–153.
- De Fretes, P. N. 2017. Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Yapen. *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*, 2(2), 1–33.
- Deny, S. 2021. *Ridwan Kamil Usul Pembangunan Infrastruktur Air hingga Transportasi di Jabar*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4484805/ridwan-kamil-usul-pembangunan-infrastruktur-air-hingga-transportasi-di-jabar>.
- Djojohadikusumo, S. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan* (Edisi Pert). Pustaka LP3ES.
- DJPK. 2020. *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>.
- Dwi putri, B. S., & Budi Riharjo, I. 2018. *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi STESIA*, 7(9), 1–16. <https://doi.org/10.32662/gaj.v2i2.615>.
- Eisenhardt, K. M., & Eisenhardt, K. M. 2018. *Linked references are available on JSTOR for this article : Agency Theory : An Assessment and Review*. 14(1), 57–74.
- Ekawarna, S. U. 2017. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 2338–4603.
- Ferris, J. M. 1998. *Framework for New Public Management Theory*. 2, 225–240.
- Fitri, N., Zakaria, J., & Hasbi. 2021. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Antar Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2019. *Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia*, 8(1), 1–35. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uyn75>.
- Ghozali, I., & Latan, H. 2014. *Partial Least Square Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris* (Edisi 2). Badan Penerbit UNDIP.
- Hadi, S. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah Dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 16(1), 50–69.
- Harahap, R. 2020. *Bappeda Kota Bogor lakukan Terobosan Tingkatkan PAD*. ANTARA NEWS.COM. <https://www.antarane.ws.com/berita/1347270/bappeda-kota-bogor-lakukan-terobosan-tingkatkan-pad>.
- Hendarmin. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten / Kota Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal EKSOS*, 8(3), 144–155.
- Herman. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kota Pekanbaru. *Eko Dan Bisnis: Riau Economic and Business Review*, 8(1), 182–189.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen* (Edisi Pert). BPFE-Yogyakarta.
- Ishak, K., Arafah, R., & M, H. 2019. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Di Kota Parepare. *Economos : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.31850/economos.v2i2.522>.

- Iskandar, I. 2012. *Flypaper Effect* Pada Unconditional Grant. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 113–131. <https://doi.org/10.23917/jep.v13i1.186>.
- Ismerdekaningsih, H., & Rahayu, E. S. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (1985-2000). *JIPTUMM*.
- Jensen, C., & Meckling, H. 1976. *Theory Of The Fir : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure I. Introduction and summary* In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( 1 ) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3, 305–360.
- Karwur, J. C., Ilat, V., & Warongan, J. D. . 2018. *Flypaper Effect* Atas Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(2), 88–98. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19104.2018>.
- Komariah, D., Yogiartoro, M., & Hukom, A. 2019. Pengaruh Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(S1), 523–532.
- Krismajaya, I. P., & Dewi, N. P. M. 2019. Pengaruh Belanja Daerah dan Investasi terhadap Kesejahteraan Melalui Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 8(6), 1390–1422.
- Kuncoro, H. 2007. Asp-08 1 Fenomena *Flypaper Effect* Pada Kinerja Keuangan Pemerintah. *Symposium Nasional Akuntansi X*, Juli 2007.
- Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. 2007. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 11(1), 67–80.
- Legrenzi, G., & Milas, C. 2002. *Asymmetric and non-linear adjustment in the revenue-expenditure models*. 44(September 2000), 0–24. [https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db\\_name=NASM2002&paper\\_id=476](https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=NASM2002&paper_id=476).
- Martini, N. L. D. S., Cipta, W., & Suwendra, I. W. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Buleleng Tahun 2006 - 2012. *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1).
- Masdjojo, G. N., & Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2006-2008. *Jurnal Telaah Manajemen*, 6(1), 32–50.
- Maulana, R., & Bowo, P. A. 2013. Pengaruh Modal Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga. *JEJAK Journal of Economics and Policy*, 6(2), 103–213. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>.
- Mawarni, Darwanis, & Syukriy, A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten Dan Kota di Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 80–90.
- Mirza, D. S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009. *Economics Development Analysis Journal*, 1(2), 1–15. <https://doi.org/10.15294/edaj.v1i2.474>.
- Mulya, R., & Bustamam. 2016. Pengaruh *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pemerintah/ Kota. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 190–198. [lib.unnes.ac.id/6871/1/8479.pdf](http://lib.unnes.ac.id/6871/1/8479.pdf) <http://www.albayan.ac>.

- Novianto, R., & Hanafiah, R. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1–22.
- Nurdini, R., Wiratno, A., & Farida, Y. N. 2020. Analisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan JAKA*, 2(1), 80–94. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/252>.
- Oktora, F. Eka, & Pontoh, W. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja modal pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Accountability*, 2(1), 1–211.
- Paramartha, M., & Budiasih, I. 2016. Analisis *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Khusus Pada Belanja Modal. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayan*, 15(2), 1536–1564.
- Pelealu, A. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 1189–1197. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2892>.
- Pemkab Kuningan. 2019. *Ada 8 Pintu Pendanaan Pembangunan*. Pemerintah Kabupaten Kuningan. <https://www.kuningankab.go.id/berita/ada-8-pintu-pendanaan-pembangunan>.
- Permatasari, I., & Mildawati, T. 2016. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(1), 1–17.
- Pradita, R. R. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Akuntansi Akunesa*, 1(2).
- Priambodo, A. 2014. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2012. *Economics Development Analysis Journal*, 3(3), 427–435. <https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.5664>.
- Priambudi, W. 2017. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1), 136–147.
- Prihastuti, A. H. 2018. Pengaruh Alokasi Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota Riau. *Jurnal Menara Ekonomi*, 4(1), 1–8.
- Purbarini, E., & Masdjojo, G. N. 2015. *Flypaper Effect* pada Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Pemerintah Kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 16(1), 75–84. <http://journals.ums.ac.id>.
- Putri, Z. M., & Kurnia. 2020. *Flypaper Effect* Pada Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/ Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi STESIA*, 9(1), 1–22.
- Radjab, E., & Jam'an, A. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Rakhmawati, Z., Nazar, M. R., & Zutilisma, D. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2014). *E-Proceeding Of Management*, 5(2), 1709–1714. <https://doi.org/10.3969/j.issn.1001-1242.2017.07.028>.
- Rizky, R. L., Agustin, G., & Mukhlis, I. 2016. Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Studi Pembangunan*, 8(1), 9–16. <https://doi.org/10.17977/um002v8i12016p009>.

- Sari, I. N. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan Dana Alokasi Umum. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(12), 1–19.
- Setiawan, G. B. K. P., & Budiana, D. N. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 4(10), 1276–1303.
- Siregar, B., & Badrudin, R. 2017. *Degree of fiscal decentralization and flypaper effect: Evidence from Indonesia. Advanced Science Letters*, 23(9), 9013–9019. <https://doi.org/10.1166/asl.2017.10014>.
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (ed.); 1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Solikin, A. 2016. Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengujian Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Di Indonesia (Studi Tahun 2012-2014). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 16(1), 11. <https://doi.org/10.20961/jab.v16i1.187>.
- Subadriyah, & Solikul, H. 2018. Analisis *Flypaper effect* pada belanja daerah kabupaten dan kota di provinsi jawa tengah. *Jurnal Ekonomi Optimum*, 8(2), 183–194.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (2nd ed.). Kencana.
- Sumarmi, S. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I. Yogyakarta. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta*.
- Susanti, S., & Fahlevi, H. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(1), 183–191.
- Syofya, H. 2018. Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 177–185.
- UNDP. 1996. Human Development Report 1996. *United Nations Development Programme*, 1–145. [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/257/hdr\\_1996\\_en\\_complete\\_nostats.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/257/hdr_1996_en_complete_nostats.pdf).
- Wahyudin, D., & Yuliadi, I. 2013. Determinan Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 14(2), 120–126. <https://doi.org/10.18196/jesp.14.2.1255>.
- Wardana, D. P. 2016. Pengaruh Pembangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia Di Kalimantan Timur. *INOVASI: Jurnal Ekonomi Keuangan, Dan Manajemen*, 12(2), 179–191. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI/article/view/804>.
- Wati, M. R., & Fajar, C. M. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 1(1), 63–76. <https://doi.org/10.34209/equ.v2i1i.628>.
- Yasinta Dwiandari, L. D., & Nyoman Badera, I. Dewa. 2018. Pengaruh Kinerja Keuangan pada Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya pada Indeks Pembangunan Manusia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(3), 1741–1770.